



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga penyusunan dan penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029, akan dijadikan acuan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tanah Datar.

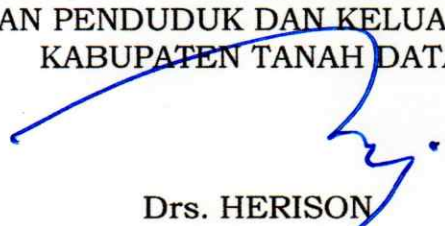
Dalam penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar ini juga mempedomani hasil-hasil pelaksanaan pembangunan serta memperhatikan peluang dan tantangan serta potensi sumber daya yang ada untuk pembangunan lima tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam penyusunan dan penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Semoga Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar ini berguna sebagai acuan bagi proses peningkatan kualitas pelayanan dan upaya Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tanah Datar.

Batusangkar, November 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR



Drs. HERISON

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680619 198902 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	23
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	23
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.2.2 Isu Strategis.....	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	32
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	32
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	34
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	36
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	40
4.1 Uraian Program.....	40
4.2 Uraian Kegiatan	41
4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	43
4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	123
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	128
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	129
BAB V PENUTUP	130

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan ASN berdasarkan bagian/bidang.....	12
Tabel 2.2	Susunan PLKB masing-masing Kecamatan	12
Tabel 2.3	Daftar aset tanah tahun 2024	12
Tabel 2.4	Daftar aset peralatan dan mesin tahun 2024	13
Tabel 2.5	Daftar aset Gedung dan bangunan tahun 2024	13
Tabel 2.6	Capaian Sasaran Strategis I	13
Tabel 2.7	Capaian Sasaran Strategis II	14
Tabel 2.8	Capaian Sasaran Strategis III	15
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan tahun 2021-2026	16
Tabel 2.10	Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Tanah Datar	17
Tabel 2.11	Persentase Desa Mandiri	17
Tabel 2.12	Capaian Indikator Kinerja Kunci tahun 2021-2024	18
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Perangkat Daerah	19
Tabel 2.14	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	30
Tabel 3.1	Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	33
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	37
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	39
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	44
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	86
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	123
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	128
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi	11
Gambar 2.2	Regulasi/ aturan yang dilahirkan oleh KAN/ Pemerintah Nagari Tentang Adat Salingka Nagari	14
Gambar 2.3	BumNag Bersama yang Terbentuk	14
Gambar 2.4	Kampung Keluarga Berkualitas Kategori Berkelanjutan (Paripurna)	15
Gambar 2.5	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>).....	16
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah	34
Gambar 3.2	Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD	34
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	43

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perangkat daerah maka daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah maka perangkat daerah harus menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun, dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dan (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Fungsi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah melewati tahapan sebagai berikut;

- (a) Persiapan penyusunan Renstra, meliputi; pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, pelaksanaan orientasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir, hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- (b) Penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah, melewati tahapan sebagai berikut; perumusan rancangan Renstra dan Penyajian rancangan renstra;
- (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan pada RPJMD; dan

- (d) Penetapan renstra Perangkat Daerah, berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan renstra Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029 dengan visi “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022–2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 58);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 61);

Sebagai bagian dari pedoman teknis dalam penyusunan Renstra Tahun 2025–2029, Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 juga merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Instruksi ini memberikan arahan strategis dan operasional dalam proses penyusunan Renstra, termasuk penyesuaian dengan arah kebijakan dalam RPJMD Tahun 2025–2029, integrasi visi-misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan, serta penajaman indikator kinerja pembangunan daerah. Meskipun tidak berbentuk peraturan, dokumen ini menjadi rujukan penting yang bersifat operasional dan digunakan sebagai aturan tambahan internal guna menjamin keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 dimaksud untuk menyediakan pedoman dan acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjabarkan lebih rinci dari RPJMD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

2. Menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menjalankan kegiatan pembangunan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang lebih operasional dan berorientasi pada kegiatan tahunan.
4. Menjadi alat untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah, baik dalam pelaksanaan program maupun pencapaian tujuan dan sasaran
5. Membantu mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
6. Menyelaraskan kegiatan antar perangkat daerah dan memastikan kesinambungan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renstra perangkat daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renstra perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala perangkat daerah, memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Serta memuat tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target renstra perangkat daerah periode sebelumnya

- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan penentuan isu-isu strategis dengan mereviu faktor-faktor pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program
4.2. Uraian Kegiatan
4.3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
4.4. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan pelaksanaan pengendalian serta evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 36 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemerintahan dan keuangan Desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemerintahan dan keuangan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemerintahan dan keuangan Desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

1. Dinas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sedangkan dinas dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemerintahan dan keuangan Desa dan Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemerintahan dan keuangan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemerintahan dan keuangan Desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - d) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat
- Sekretariat mempunyai tugas memberikan Pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas. Sedangkan sekretariat dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
 - b) Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
 - c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas;
 - d) Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas urusan hukum, ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, bahan penyusunan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian. Sedangkan sub bagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a) Penghimpunan kebijakan hukum, teknis administrasi kepegawaian dan umum sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b) Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d) Penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - e) Pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - f) Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui daftar urut kepangkatan dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - h) Pelaksanaan administrasi pengurusan, penyimpan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup dinas;
 - i) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - j) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan perencanaan, keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas. Sedangkan

sub bagian perencanaan dan keuangan dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset Dinas,
 - b) Pelaksanaan perbendaharaan keuangan dan aset anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perbendaharaan barang Dinas;
 - c) Pelaksanaan administrasi keuangan dan aset dan penyiapan bahan pembinaan administrasi pembukuan pendapatan/penerimaan;
 - d) Penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas;
 - e) Penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan keuangan dan aset sesuai perundangan berlaku;
 - f) Penyiapan dan memelihara dokumen keuangan dan aset sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g) Pengelolaan inventaris kantor baik yang statis maupun yang bergerak;
 - h) Pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian inventaris perlengkapan Dinas,
 - i) Penyusunan program dan rencana pengelolaan keuangan dan aset;
 - j) Penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan; dan
 - k) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

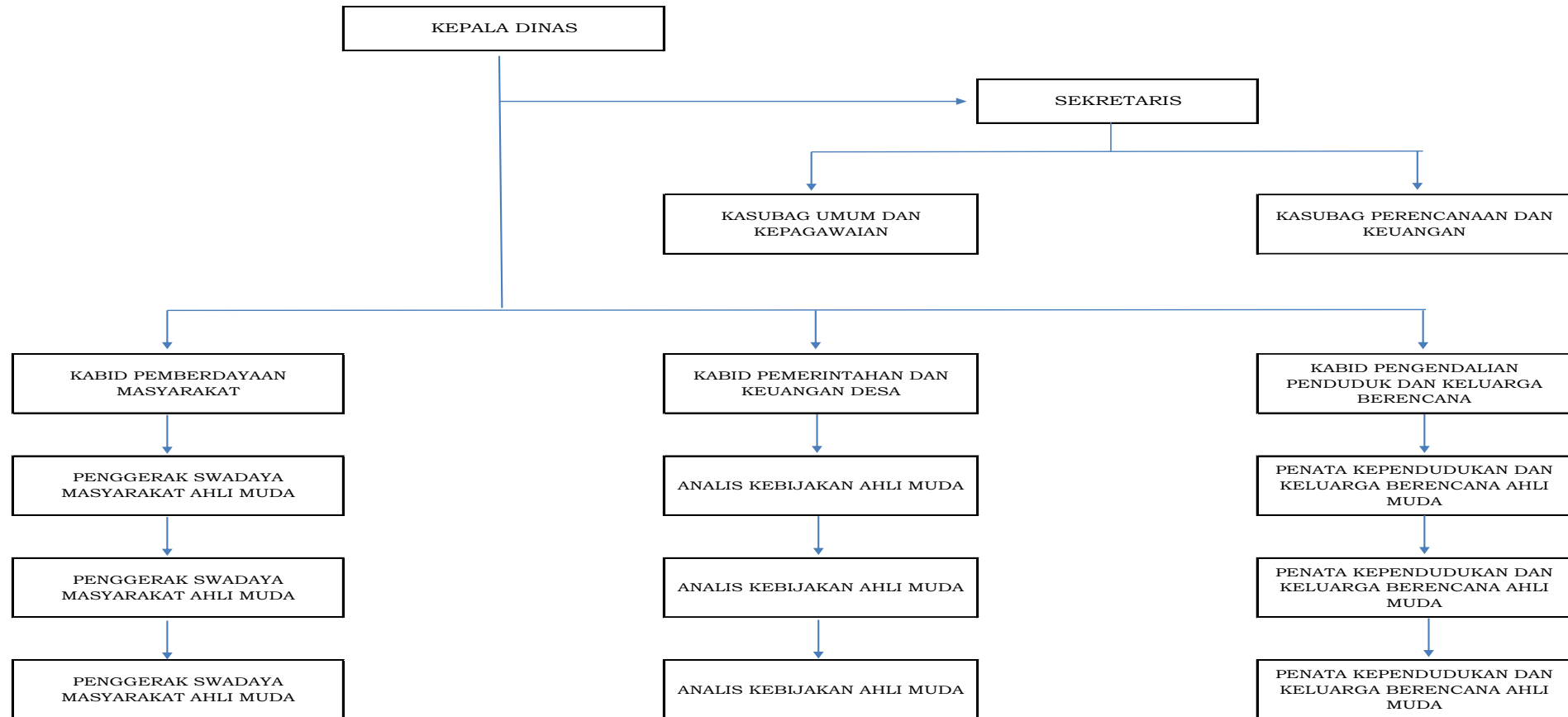
Bidang pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta kelembagaan dan sosial budaya masyarakat. Sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- b) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta kelembagaan dan social budaya masyarakat;
- c) Penyusunan bahan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- d) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta kelembagaan dan social budaya masyarakat;
- e) Pelaporan di bidang pembangunan dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta kelembagaan dan sosial budaya masyarakat; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Pemerintahan Dan Keuangan Desa
Bidang pemerintahan dan keuangan desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, kapasitas perangkat desa, pembinaan desa, keuangan dan asset Desa. Sedangkan bidang pemerintahan dan keuangan desa dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan kapasitas perangkat Desa, keuangan Desa serta pembinaan dan kerja sama Desa;
 - b) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan kapasitas perangkat Desa, keuangan Desa serta pembinaan dan kerja sama Desa;
 - c) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan kapasitas perangkat Desa, keuangan Desa serta pembinaan dan kerjasama Desa;
 - d) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan kapasitas perangkat Desa, keuangan desa serta pembinaan dan kerja sama Desa;
 - e) Pelaporan di bidang kelembagaan dan kapasitas perangkat desa, keuangan Desa serta pembinaan dan kerja sama Desa; dan
 - f) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sedangkan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga,
 - d) Pelaporan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai gambaran struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi



Sumber: DPMDPPKB, 2025

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tercatat secara keseluruhan berjumlah 50 (lima puluh) orang (PNS dan Non PNS) dengan rincian sebanyak 25 (dua puluh lima) orang PNS, 12 (dua belas) orang Non PNS dan 14 (empat belas) non PNS di Balai penyuluh Keluarga Berencana yang terdapat pada 14 (empat belas) Kecamatan.

Tabel 2.1
Susunan ASN berdasarkan bagian/bidang

NO	BAGIAN/BIDANG	JUMLAH
1	Sekretariat	13
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	7
3	Bidang Pemerintahan Desa	7
4	Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	9

Sumber: DPMDPPKB, 2025

Dalam pelaksanaan tugas Program Nasional Keluarga Berencana perlu adanya petugas yang handal di lapangan guna melakukan penyuluhan KB pada masyarakat, dengan nama Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dimana status kepegawaiannya terhitung awal Tahun 2018 telah dialihkan menjadi Pegawai Pusat. Berikut jumlah pegawai petugas penyuluh lapangan keluarga berencana pada masing-masing Kecamatan, berikut disampaikan data petugas PLKB pada masing-masing Kecamatan :

Tabel 2.2
Susunan PLKB pada masing-masing kecamatan

NO	KECAMATAN	PLKB
1	Kecamatan Lima Kaum	2
2	Kecamatan Tanjung Emas	2
3	Kecamatan Batipuh	3
4	Kecamatan Batipuh Selatan	1
5	Kecamatan Pariangan	2
6	Kecamatan Padang Ganting	1
7	Kecamatan Rambatan	2
8	Kecamatan Sungayang	1
9	Kecamatan Salimpaung	2
10	Kecamatan Tanjung Baru	1
11	Kecamatan Lintau Buo	1
12	Kecamatan Lintau Buo Utara	2
13	Kecamatan Sungai Tarab	3
14	Kecamatan X Koto	3

Sumber: DPMDPPKB, 2025

Disamping itu untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dalam rangka pelayanan kepada masyarakat telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tabel 2.3
Daftar Aset Tanah Tahun 2024

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH
1	Tanah		273.136.000,00

Sumber: DPMDPPKB, 2025

2. Peralatan dan Mesin

Tabel 2.4
Daftar Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Mobil	7 Unit	
2	Mesin ketik	5 Unit	
3	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	42 Unit	
4	Alat kantor lainnya	41 Unit	
5	Alat rumah tangga	156 Unit	
6	Alat pendingin	19 Unit	
7	Alat dapur	4 Unit	
8	Alat rumah tangga lainnya	16 Unit	
9	Meja kerja pejabat	46 Unit	
10	Meja rapat pejabat	1 Unit	
11	Kursi kerja pejabat	24 Unit	
12	Lemari dan arsip pejabat	4 Unit	
13	Alat komunikasi telephone	46 Unit	
14	Alat kedokteran keluarga berencana	79 Unit	
15	Alat laboratorium pertanian	1 Unit	
16	Personal Komputer	28 Unit	
17	Peralatan Personal Komputer	37 Unit	

Sumber: DPMDPPKB, 2025

3. Gedung dan Bangunan

Tabel 2.5
Daftar Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Bangunan Gedung Kantor	16 Unit	
2	Bangunan Gudang	1 Unit	
3	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1 Unit	
4	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1 Unit	

Sumber: DPMDPPKB, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rata-rata capaian indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya regulasi/aturan yang dilahirkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)/pemerintah nagari tentang adat salingka nagari

Sasaran strategis I dapat diukur dari indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada tabel berikut:

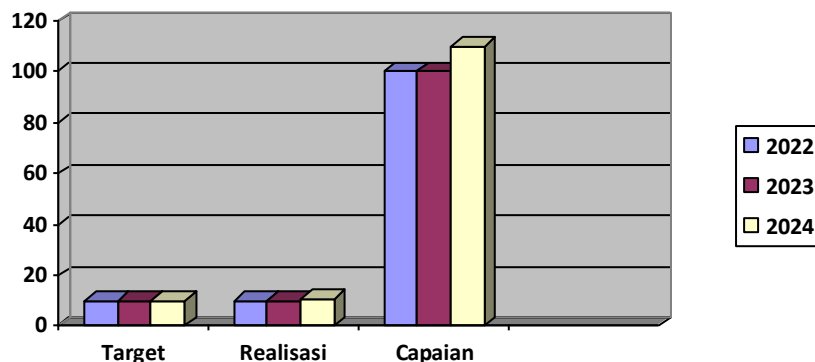
Tabel 2.6
Sasaran Strategis I

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024	KET
1	Jumlah regulasi/aturan yang dilahirkan dan dilaksanakan	-	10	10	11	

Sumber: DPMDPPKB, 2025

Gambar 2.2
Regulasi/aturan yang dilahirkan oleh KAN/Pemerintah Nagari
tentang adat salingka nagari



Sumber: DPMDPPKB, 2025

Berdasarkan tabel 2.6 dan gambar 2.2 dapat dilihat bahwa capaian nilai akuntabilitas kinerja dari tahun 2022 ketahun 2023 adalah sama hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan regulasi/aturan oleh KAN/Pemerintah Nagari. Sedangkan capaian nilai akuntabilitas kinerja dari tahun 2023 ketahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 10% karena adanya penambahan 1 (satu) nagari yang melahirkan regulasi/aturan.

- b. Sasaran Strategis II : Meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha ekonomi kreatif.

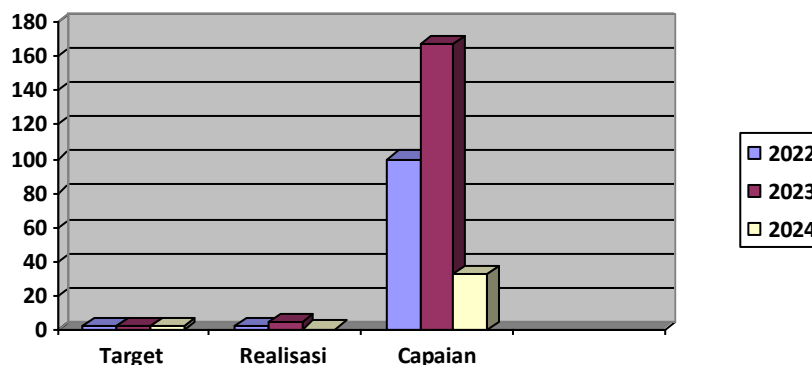
Sasaran strategis II dapat diukur dari indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Sasaran Strategis II
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024	KET
1	Jumlah pelaku ekonomi kreatif (BumNag bersama yang terbentuk)	-	3	5	1	

Sumber: DPMDPPKB, 2025

Gambar 2.3
BumNag Bersama yang Terbentuk



Sumber: DPMDPPKB, 2025

Berdasarkan tabel 2.7 dan gambar 2.3 dapat dilihat bahwa capaian nilai akuntabilitas kinerja dari tahun 2022 ketahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 67% karena BumNag bersama yang terbentuk pada tahun 2023 melebihi dari target yang ditetapkan dan capaian nilai akuntabilitas kinerja dari tahun 2023 ketahun 2024 mengalami penurunan karena masih adanya 2 (dua) BumNag bersama yang masih dalam proses pendaftaran yaitu Bum Desa Bersama Rangkian Mandiri Kecamatan Rambatan dan Bum Desa Bersama Lenggogeni Kecamatan Sungai Tarab.

c. Sasaran Strategis III : Peningkatan Keluarga yang Berkualitas

Sasaran strategis III dapat diukur dari indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Sasaran Strategis III

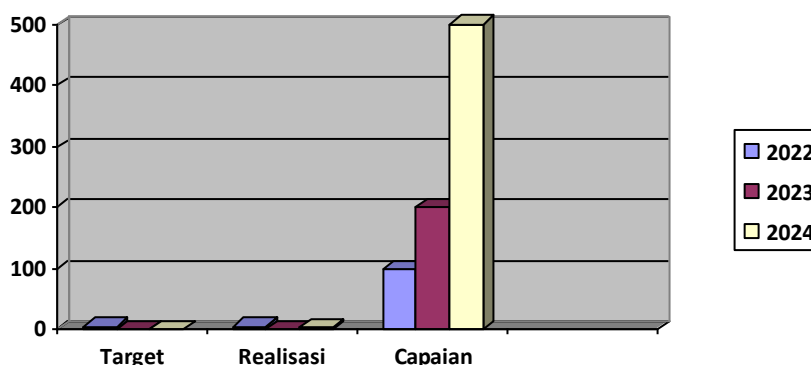
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	2024	KET
1	Jumlah kampung keluarga berkualitas kategori berkelanjutan (paripurna)	-	6	2	5	
2	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	-	27.24	14.11	8.44	

Sumber: DPMDPPKB, 2025

Gambar 2.4

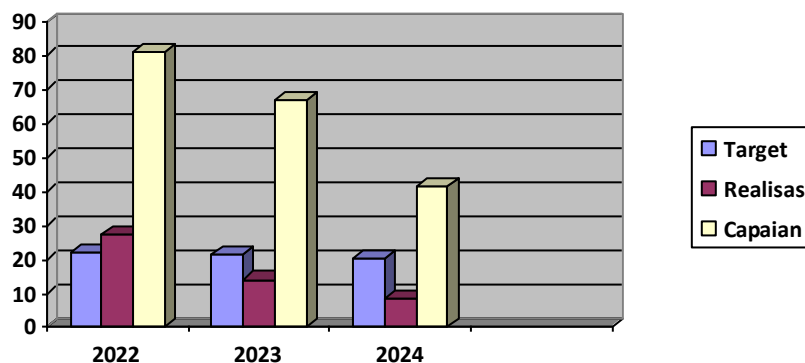
Kampung Keluarga Berkualitas Kategori Berkelanjutan (paripurna)



Sumber: DPMDPPKB, 2025

Berdasarkan tabel 2.8 dan gambar 2.4 dapat dilihat bahwa capaian nilai akuntabilitas kinerja dari tahun 2022 ketahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 100% karena adanya peningkatan kampung Keluarga Berkualitas kategori Berkelanjutan sebesar 1 Kampung KB. Sedangkan capaian nilai akuntabilitas kinerja dari tahun 2023 ketahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena penetapan target kampung keluarga berkualitas tahun 2024 terlalu rendah sedangkan realisasi bisa melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5 (lima) kampung keluarga berkualitas.

Gambar 2.5
 Persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB
 yang tidak terpenuhi (unmet need)



Sumber: DPMDPPKB, 2025

Berdasarkan tabel 2.8 dan gambar 2.5 dapat dilihat bahwa capaian nilai akuntabilitas kinerja dari tahun 2022 ketahun 2023 mengalami penurunan sebesar 14,2%. Dan capaian nilai akuntabilitas kinerja dari tahun 2023 ketahun 2024 mengalami penurunan sebesar 24,98%. Namun untuk indikator ini semakin tinggi penurunan maka semakin baik capaian kinerja yang dihasilkan, sehingga pasangan usia subur yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) semakin kecil jumlahnya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2025 sebagai berikut :

Tabel 2.9
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI			
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya regulasi yang dilahirkan oleh KAN/pemerintah nagari tentang adat salingka nagari	Jumlah regulasi yang dilahirkan dan dilaksanakan	10	10	10	15	15		10	10	11
Meningkatnya kuantitas dan kualitas usaha ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif (BumNag bersama yang terbentuk)	3	3	3	3	1		3	5	1
Peningkatan keluarga yang berkualitas	1. Jumlah kampung keluarga berkualitas kategori berkelanjutan (paripurna)	4	2	1	1	1		6	2	5
	2. Persentase pasangan usia subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need)	22,7	22,00	21,2	20,3	19,3		27,24	14,11	8,44

Sumber: DPMDPPKB, 2025

Dari tabel 2.9, dapat dilihat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2024 telah tercapai berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut dapat diinformasikan capaian kinerja tahun 2021-2024 yang berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Nilai IPK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir capaian IPK Kabupaten Tanah Datar mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari 55,53 pada tahun 2022 menjadi 62,42 pada tahun 2024, ini menunjukkan bahwa kualitas keluarga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2.10

Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Tanah Datar

NO	TAHUN	INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA
1.	2020	-
2.	2021	-
3.	2022	55,53
4.	2023	60,14
5.	2024	62,42

Sumber: DPMDPPKB, 2025

2. Persentase Desa Mandiri

Desa/Nagari Mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.

Persentase nagari mandiri mengacu pada proporsi nagari atau wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau sumber daya dari luar. Ini mencerminkan kemampuan suatu nagari untuk mengatur dan mengelola sumber daya lokalnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakatnya.

Tabel 2.11

Persentase Desa Mandiri

NO	TAHUN	PERSENTASE DESA MANDIRI
1.	2020	30,67
2.	2021	30,67
3.	2022	48,00
4.	2023	61,33
5.	2024	65,33

Sumber: DPMDPPKB, 2025

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Persentase Desa/Nagari Mandiri di Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan dari 30,67% pada tahun 2020 menjadi 65,33% pada tahun 2024. Dimana pada tahun 2024 dari 75 (tujuh puluh lima) nagari yang ada sebanyak 49 (empat puluh sembilan) nagari sudah mandiri.

B. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.12
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Tahun 2021-2024

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,62	0	2,34	2,37	2,29
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	70,73	55,93	59,06	64,85	67,41
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14,63	27,96	27,24	14,01	8,44

Sumber: DPMDPPKB, 2025

Untuk capaian anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Perangkat Daerah

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
BELANJA DAERAH	13.911.109.330	15.968.841.520	19.054.005.866	14.860.777.808	12.159.212.470	13.991.154.480	17.613.790.970	14.167.090.283	87,41	87,62	92,44	95,33
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.914.907.851	4.406.874.939	3.922.506.807	4.006.351.816	3.793.860.894	4.166.841.931	3.857.473.286	3.755.689.612	96,91	94,55	98,34	93,74
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.770.000	16.770.000	14.010.250	6.854.000	14.092.750	16.386.700	12.927.000	6.843.000	84,04	97,71	92,27	99,84
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.433.143.381	3.918.314.181	3.398.671.687	3.625.365.746	3.333.549.394	3.687.734.446	3.347.892.430	3.390.583.544	97,10	94,12	98,51	93,52
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.412.500	6.650.000	-	4.200.000	2.200.000	5.950.000	-	4.191.000	64,47	89,47	0,00	99,79
Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.057.208	109.057.208	88.757.770	40.099.070	108.098.470	108.717.770	87.694.800	39.732.200	99,12	99,69	98,80	99,09
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.098.812	-	35.842.000	-	31.015.000	-	32.000.000	-	99,73	0,00	89,28	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.743.000	118.736.200	126.477.800	131.785.700	108.780.549	116.488.746	123.523.991	126.432.823	98,23	98,11	97,66	95,94
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.682.950	237.347.350	258.747.300	198.047.300	196.124.731	231.564.269	253.435.065	187.907.045	93,09	97,56	97,95	94,88
PROGRAM PENATAAN DESA		25.000.000	5.396.900			24.169.800	5.346.500			96,68	99,07	0,00

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Penataan Desa		25.000.000	5.396.900			24.169.800	5.346.500			96,68	99,07	0,00
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	58.875.000	20.000.000	-	1.500.000	49.336.742	19.454.780	-	1.461.600	83,80	97,27	0,00	97,44
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	58.875.000	20.000.000	-	1.500.000	49.336.742	19.454.780	-	1.461.600	83,80	97,27	0,00	97,44
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.933.857.682	1.963.527.200	4.066.877.625	151.413.500	2.353.579.442	1.641.306.943	3.978.718.385	124.531.422	80,22	83,59	97,83	82,25
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.933.857.682	1.963.527.200	4.066.877.625	151.413.500	2.353.579.442	1.641.306.943	3.978.718.385	124.531.422	80,22	83,59	97,83	82,25
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.634.576.929	2.167.208.700	3.385.297.808	3.660.830.820	1.525.153.993	2.109.264.157	3.210.714.595	3.605.613.942	93,31	97,33	94,84	98,49
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.634.576.929	2.167.208.700	3.385.297.808	3.660.830.820	1.525.153.993	2.109.264.157	3.210.714.595	3.605.613.942	93,31	97,33	94,84	98,49
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	64.649.962	64.649.962	43.008.840	9.408.230	58.508.450	47.886.900	35.998.400	9.117.500	90,50	74,07	83,70	96,91

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	64.649.962	64.649.962	43.008.840	9.408.230	58.508.450	47.886.900	35.998.400	9.117.500	90,50	74,07	83,70	96,91
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.154.896.550	6.885.685.250	5.244.089.515	4.700.834.692	4.245.281.949	5.681.242.637	4.296.466.620	4.395.786.767	82,35	82,51	81,93	93,51
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.254.160.975	2.992.905.000	1.607.449.315	1.325.455.992	1.108.754.099	2.157.343.900	1.462.086.750	1.276.406.600	88,41	72,08	90,96	96,30
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.147.949.850	1.150.580.250	1.234.818.200	1.879.396.700	1.147.780.000	1.121.649.950	1.225.435.470	1.841.184.157	99,99	97,49	99,24	97,97
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.042.929.725	2.443.950.000	2.124.322.000	1.128.732.000	1.353.577.650	2.132.559.387	1.333.526.050	932.903.310	66,26	87,26	62,77	82,65
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	709.856.000	298.250.000	277.500.000	367.250.000	635.170.200	269.689.400	275.418.350	345.292.700	89,48	90,42	99,25	94,02

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	149.345.356	435.895.469	2.386.828.371	2.330.438.750	133.491.000	300.987.332	2.229.073.184	2.274.889.440	89,38	69,05	93,39	97,62
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	120.449.887	425.000.000	68.791.242	17.138.750	113.715.250	294.477.732	67.352.300	15.381.440	94,41	69,29	97,91	89,75
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	28.895.469	10.895.469	2.318.037.129	2.313.300.000	19.775.750	6.509.600	2.161.720.884	2.259.508.000	68,44	59,75	93,26	97,67

Sumber: DPMDPPKB, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2021-2024 setiap tahunnya mengalami peningkatan dan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa mengalami kendala dan hambatan yang berarti.

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah pemerintah nagari beserta kelebagaannya, seluruh masyarakat nagari dan nagari sebagai entitas, dengan fokus pada masyarakat nagari itu sendiri (individu dan kelompok di dalamnya), pasangan usia subur (PUS), ibu hamil dan nifas, pasangan yang ingin membatasi jumlah anak dan menjarangkan kehamilan, serta remaja melalui program Generasi Berencana (GenRe).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bermitra langsung dengan Pemerintahan Nagari, BPRN, kelompok pemberdayaan masyarakat, BumNag, masyarakat yang terlibat dalam program kependudukan dan pengendalian penduduk (stunting, program KB dan pemberdayaan keluarga). Sedangkan mitra diluar instansi adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Barat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Secara Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang yang secara kontekstual adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keluarga, serta memfasilitasi menanggulangi masalah sosial masyarakat.

Salah satu tujuan penting dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah meningkatkan ketahanan adat dan budaya yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dengan indikatornya adalah melahirkan regulasi tentang adat salingka nagari sehingga masyarakat di Nagari dapat melaksanakan kehidupan dan pembangunan sesuai dengan aturan dan tatanan yang ada. Sesuai kondisi saat ini tercermin bahwa regulasi yang dilahirkan oleh KAN dan Pemerintah Nagari tentang Adat Salingka Nagari ini masih rendah sehingga untuk tahun mendatang perlu ditingkatkan.

Untuk pelayanan dibidang Keluarga Berencana yang mempunyai tugas untuk menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, program pelayanan masyarakat dan Keluarga Berencana dan pembinaan masyarakat dalam membangun Keluarga Sejahtera. Untuk

menunjang tugas-tugas tersebut telah dilaksanakan kegiatan beberapa tahun terakhir ini dimana pola pembangunan masih mengacu kepada BKKBN Provinsi dan Pusat.

Langkah yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam dalam rangka pemetaan permasalahan dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan analisa SWOT. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*strengths dan weaknesses*) dan eksternal organisasi (*opportunities dan threats*), kekuatan (*strengths*), kelemahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kekuatan (*strengths*)
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diakui keberadaannya yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - b. Komitmen kuat pimpinan daerah terhadap pembangunan nagari dan ketahanan keluarga berbasis nilai ABS-SBK.
 - c. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berpengalaman dalam pembinaan nagari dan pemberdayaan masyarakat.
 - d. PKB/PLKB aktif dan dekat dengan masyarakat.
 - e. Kader keluarga, kader posyandu dan kader nagari tersebar di seluruh kecamatan.
 - f. Program ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKA) serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) aktif berjalan di nagari.
 - g. Tradisi musyawarah nagari kuat mendukung perencanaan partisipatif.
 - h. Kearifan lokal dan budaya Minangkabau (ABS-SBK) mendukung pembangunan keluarga berkualitas.
 - i. Partisipasi masyarakat tinggi dan gotong royong masih kuat.
2. Kelamahan (*Weaknesses*)
 - a. Jumlah PKB/PLKB belum ideal untuk menjangkau seluruh nagari.
 - b. Kompetensi perangkat nagari tidak merata terutama pada aspek keuangan, perencanaan dan digitalisasi.
 - c. Keterbatasan anggaran pelatihan bagi perangkat nagari dan pemberdayaan masyarakat.
 - d. Sarana operasional dan perangkat IT (*Information Technology*) belum memadai di beberapa bidang.
 - e. Kualitas data nagari dan data keluarga masih bervariasi dan masih diperlukan verifikasi.
3. Peluang (*Opportunities*)
 - a. Dukungan pemerintah pusat dan provinsi terhadap percepatan penurunan stunting dan program keluarga berkualitas.
 - b. Kebijakan penguatan nagari adat di Provinsi Sumatera Barat Perda Provinsi Nomor 7 tahun 2018.
 - c. Peningkatan dana desa yang dapat diarahkan ke pemberdayaan masyarakat dan keluarga.

- d. Meningkatnya pemanfaatan aplikasi digital untuk data nagari dan keluarga.
 - e. Kerja sama potensial dengan perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat contoh Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang serta yang ada di Tanah Datar yaitu UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
 - f. Kemitraan dengan organisasi perempuan, tokoh adat dan ninik mamak.
 - g. Potensi perantau minang yang aktif dalam membantu pembangunan nagari.
 - h. Partisipasi masyarakat tinggi terhadap program sosial dan pembangunan.
4. Ancaman (*Threats*)
- a. Masih adanya pernikahan usia dini dan kehamilan tidak direncanakan di beberapa nagari.
 - b. Mobilitas penduduk tinggi memengaruhi pola pengasuhan dan ketahanan keluarga.
 - c. Pengaruh media sosial terhadap remaja yang tidak selalu sejalan dengan nilai ABS-SBK.
 - d. Ketergantungan nagari terhadap dana desa yang menghambat kemandirian fiskal
 - e. Perubahan kebijakan pusat terkait dana desa, penyuluh KB dan struktur Lembaga berpotensi mengubah arah program dinas.
 - f. Tingginya mutasi/rotasi perangkat nagari menyebabkan ketidakstabilan kompetensi di nagari.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025–2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025–2045 dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, visi pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025–2029 dirumuskan dengan mempedomani :

1. Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Amanat kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat;
3. Adanya keinginan untuk melanjutkan dan menuntaskan program pembangunan periode sebelumnya yang terkait dengan isu strategis daerah dan prioritas pembangunan yang ditetapkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, visi pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 – 2029 dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah, ditetapkan lima sasaran Visi yaitu peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran pertama, peningkatan pendapatan per kapita mengacu pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Peningkatan pendapatan per kapita dapat dicapai melalui upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis pada peningkatan sektor pertanian, pariwisata, pengembangan industri pengolahan, pemberdayaan UMKM, pengolahan sampah dan peningkatan investasi di berbagai sektor.

Sasaran kedua, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang, merupakan tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 adalah sebesar 4,28%, masih lebih baik dibandingkan angka provinsi dan nasional. Upaya pengentasan kemiskinan dapat melibatkan serangkaian kegiatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, memberikan akses dalam pengembangan UMKM, menerapkan program perlindungan sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah.

Sasaran ketiga, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, melibatkan serangkaian langkah dan strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah daerah, Pentingnya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, efisiensi dan pengelolaan sumber daya yang baik, peningkatan pembangunan ekonomi lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan tingkat kepuasan masyarakat, peningkatan keseimbangan dan pembangunan regional, pengembangan inovasi dan teknologi serta peningkatan citra dan reputasi daerah.

Sasaran keempat, peningkatan daya saing sumber daya manusia, melibatkan peningkatan kualitas, keterampilan dan kapasitas individu serta kelompok dalam memenuhi tuntutan pasar kerja dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dapat diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas, peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengembangan profesional, serta kewirausahaan dan inovasi.

Sasaran kelima, peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan aspek penting untuk mendukung kehidupan yang sehat dan berkelanjutan dan diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut diantaranya penyusunan kebijakan lingkungan, penegakan peraturan lingkungan, pengelolaan limbah efektif, promosi energi terbarukan, pendidikan dan kesadaran masyarakat, pengembangan perekonomian hijau serta pengukuran dan pemantauan kualitas lingkungan.

Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah akan dicapai melalui 7 (tujuh) misi pembangunan jangka menengah yang menggambarkan strategi yang akan ditempuh yang terdiri dari:

- Misi I Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
- Misi II Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- Misi III Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, UMKM dan peningkatan investasi
- Misi IV Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

- Misi V Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
- Misi VI Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah
- Misi VII Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

2.2.2 Isu Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 36 tahun 2023 dengan tugas adalah melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati dimasud Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat mempunyai 3 (tiga) bidang antara lain :

- a) Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.
- b) Bidang Pemerintahan dan Keuangan Desa yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan kapasitas perangkat desa, pembinaan desa, aset, kerjasama desa serta keuangan desa.
- c) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintah dimana BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan dukungan manajemen pengelolaan kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana yang handal.

Sasaran strategis BKKBN dalam rancangan renstra BKKBN tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan pengendalian penduduk.
2. Meningkatnya keluarga yang menerapkan 8 (delapan) fungsi keluarga.
3. Meningkatnya pencegahan kehamilan diusia 15-19 tahun kalangan remaja.
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan ber KB.
5. Meningkatnya perencanaan kehamilan.
6. Terwujudnya penggerakan lini lapangan yang berkualitas melalui integrasi program bangga kencana dengan mitra kerja.
7. Terwujudnya perencanaan kebijakan strategis kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana yang berkualitas.

Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan membantu Gubernur Sumatera Barat dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. Pembinaan dan fasilitas bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas ;
- e. Pelasanaan tugas di bidang pemerintahan desa/nagari, kelembagaan masyarakat, partisipasi masyarakat, kelembagaan adat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pengembangan kawasan perdesaan;
- f. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian misi Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Misi IV Pendidikan merata, kesehatan berkualitas
Misi IV Nagari/Desa sebagai basis kemajuan
Misi VIII Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas

Sasaran Jangka Menengah dari renstra Perangkat Daerah provinsi dan Kabupaten Tanah Datar adalah :

- a) Meningkatnya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana
- b) Menyiapkan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.
- c) Meningkatnya peran Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag)/Bumnag bersama dalam rangka peningkatan usaha ekonomi masyarakat di Nagari
- d) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- e) Meningkatnya pengelolaan pemerintahan nagari dalam rangka pelayanan pada masyarakat nagari.

Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah

Kebijakan dan Strategi pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Datar mencakup kebijakan dan strategi struktur ruang yaitu kebijakan berkaitan dengan hirarki pusat-pusat kegiatan dan prasarana wilayah dan kebijakan dan strategi pola ruang yaitu kebijakan dan strategi terhadap kawasan lindung

dan kawasan budidaya yang mencakup diantaranya adalah Penetapan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan dalam kerangka tata ruang wilayah kabupaten untuk menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan administrasi masyarakat yang telah dirumuskan diantaranya adalah Menetapkan dan mengembangkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Tanah Datar untuk melayani nagari maupun jorong yang tidak ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Penentuan Isu-isu Strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

- A. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 1. Belum optimalnya KAN / Pemerintah Nagari dalam penyiapan regulasi tentang adat salingka nagari.
 - 2. Pengembangan ekonomi nagari masih terbatas seperti belum optimalnya BumNag.
- B. Bidang Pemerintah dan Keuangan Desa
 - 1. Masih rendahnya kapasitas perangkat nagari dalam tata Kelola pemerintahan, keuangan dan pelayanan publik.
 - 2. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan dana desa (akuntabilitas, perencanaan berbasis partisipasi serta tepat sasaran).
- C. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 1. Peningkatan kampung keluarga berkualitas (berkembang, mandiri, paripurna)
 - 2. Masih rendahnya pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan rendahnya partisipasi pria dalam ber KB
 - 3. Masih rendahnya pemahaman remaja dan pasangan usia subur tentang kesehatan Reproduksi
 - 4. Belum optimalnya pengembangan/pemberdayaan institusi masyarakat dalam program KB
 - 5. Ketahanan keluarga masih rendah ditandai dengan pola asuh kurang optimal, tingginya kasus perceraian dan masalah kesejahteraan dan gizi keluarga
 - 6. Belum maksimalnya sinergi antar Perangkat daerah dalam pelaksanaan program bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB) yang terintegrasi dengan percepatan penurunan stunting

Tabel 2.14
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis
Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sistem nagari yang kuat	Kapasitas aparatur perangkat nagari yang belum merata dan pengelolaan keuangan belum akuntabel		Standar internasional pembangunan berkelanjutan (SDGs) mendorong nagari untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar, pemberdayaan keluarga dan penguatan ekonomi lokal	Implementasi UU Desa dan kebijakan Dana Desa terkait tata Kelola nagari, pengawasan dan peningkatan kapasitas aparatur nagari	Provinsi mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Nagari (IDM) dan kualitas tata kelola pemerintahan nagari	Kualitas tata Kelola pemerintahan, keuangan dan pelayanan publik nagari masih rendah
Pertumbuhan BumNag dan potensi ekonomi lokal	Pengelolaan BumNag tidak profesional dan produk unggulan nagari kurang dikembangkan	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Standar internasional pembangunan berkelanjutan (SDGs) mendorong nagari untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar, pemberdayaan keluarga dan penguatan ekonomi local	Penekanan pada kemandirian desa melalui penguatan kelembagaan BumNag	Perubahan struktur ekonomi daerah menuntut nagari memiliki BumNag yang produktif dan inovatif	Kemandirian ekonomi nagari dan keberlanjutan BumNag belum optimal
Modal sosial tinggi (gotong-royong, PKK, Kader PPKBJ/Sub PPKBJ dan kader posyandu)	Edukasi keluarga belum merata serta sanitasi dan gizi rumah tangga belum baik	Kehidupan sehat dan Sejahtera	Krisis pangan global meningkatkan urgensi pembinaan ketahanan keluarga, diversifikasi pangan rumah tangga	Target nasional percepatan penurunan stunting	Prioritas provinsi Sumbar penguatan pencegahan stunting	Angka prevelensi stunting masih tinggi dan ketahanan keluarga lemah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Infrastruktur pelayanan dasar tersedia	Pengetahuan keluarga tentang KB masih rendah	Kehidupan sehat dan Sejahtera	Tren global penurunan fertilitas dan aging population mendorong adaptasi kebijakan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga	Arahan BKKBN mengenai peningkatan cakupan KB pelayanan Kesehatan reproduksi dan pembinaan ketahanan keluarga	Peningkatan kompetisi antar daerah pada indikator keluarga berkualitas dalam mendorong peningkatan kualitas pembinaan nagari	Belum optimalnya pengembangan/pemberdayaan institusi masyarakat dalam program KB serta masih rendahnya pemahaman remaja dan pasangan usia subur tentang Kesehatan reproduksi
Komitmen daerah tinggi terhadap penurunan stunting dan penguatan nagari	Belum optimalnya penanganan stunting	Kehidupan sehat dan Sejahtera	Krisis pangan global meningkatkan urgensi pembinaan ketahanan keluarga, diversifikasi pangan rumah tangga	Target nasional percepatan penurunan stunting	Prioritas provinsi Sumbar penguatan pencegahan stunting	Belum maksimalnya sinergi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB) yang terintegrasi dengan percepatan penurunan stunting

Sumber: DPMDPPKB, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029 maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sehingga dapat memberikan arah yang tepat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh organisasi.

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan adalah arah atau haluan yang ingin dicapai, sebuah kondisi masa depan yang diinginkan, atau maksud dari suatu tindakan. Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama lima tahun, serta untuk menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Renstra juga berfungsi sebagai tolok ukur evaluasi kinerja dan sebagai dasar penyusunan Renja tahunan, serta memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan.

Kerangka keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah Renstra perangkat daerah harus dijabarkan selaras dengan RPJMD. RPJMD menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan, sementara Renstra Perangkat Daerah merinci tujuan dan sasaran yang lebih spesifik untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan RPJMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menetapkan tujuan yang akan dicapai 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

1. Terwujudnya keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif
2. Terwujudnya nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
3. Terwujudnya Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah penjabaran dari sebuah tujuan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memiliki batas waktu tertentu. Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah target-target yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih umum dan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.

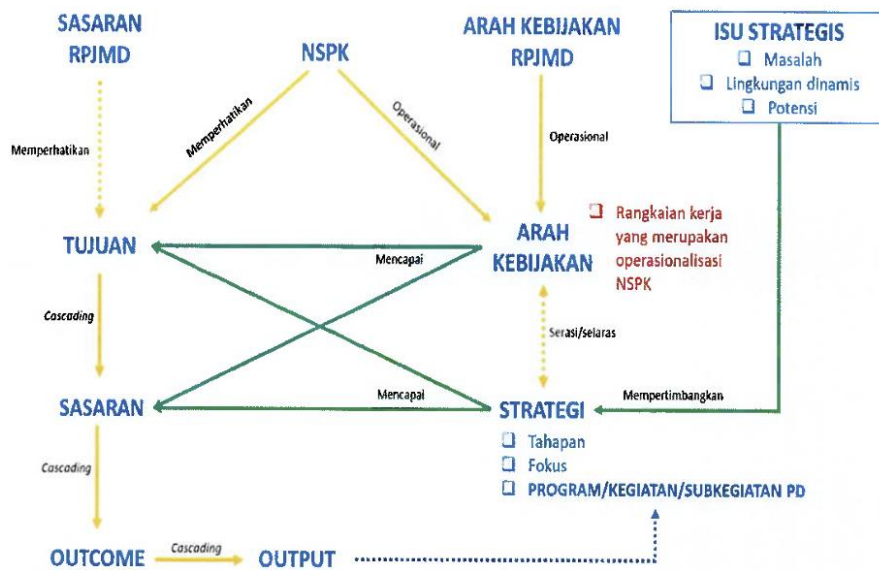
Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan dicapai dengan indikator tujuan/sasaran yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Perangkat Daerah

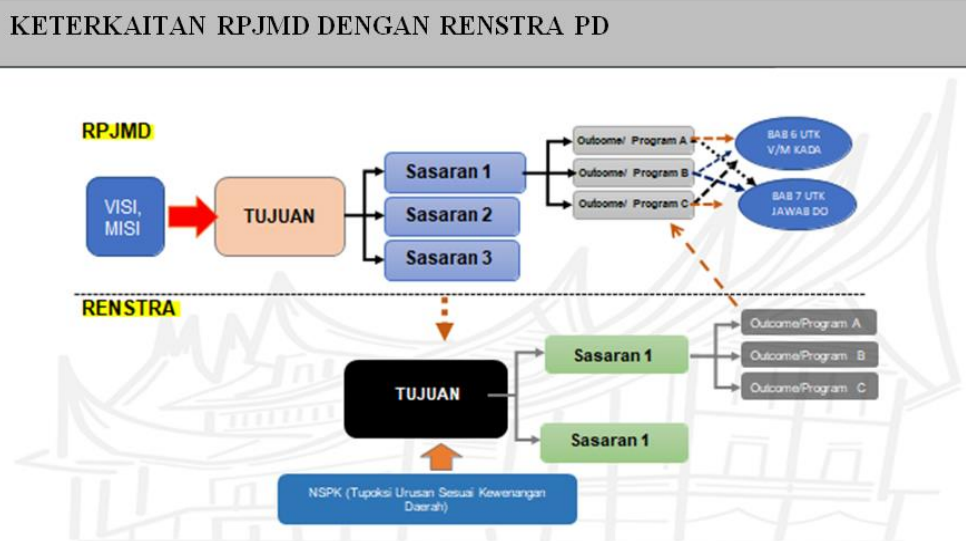
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
- Meningkatkan keluarga berkualitas, dan masyarakat inklusif - Nagari Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif	Meningkatnya keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga	62,92	63,42	63,97	64,49	64,99	65,49
		Meningkatnya peran dan tata kelola lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang terfasilitasi	90%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pendampingan keluarga beresiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga	Persentase keluarga beresiko stunting yang terdampingi oleh Tim Pendamping Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Persentase desa mandiri	66,67%	68%	69,33%	70,67%	72%	73,33%
	Terwujudnya Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (71.50)	BB (71.70)	BB (71.90)	BB (72.10)	BB (72.30)	BB (72.50)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89,50	89,70	89,90	90,10	90,30	90,50
		Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	1	1	1	1

Sumber: DPMDPPKB, 2025

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3.2
Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD



3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029 antara lain:

1. Sasaran I: Meningkatnya keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif

Strategi yang dilakukan adalah:

- a. Penguatan pemahaman 8 (delapan) fungsi keluarga
- b. Penguatan peran keluarga dalam pengasuhan, Pendidikan karakter dan pencegahan risiko sosial
- c. Peningkatan kualitas pendampingan dan edukasi keluarga melalui kader, penyuluh dan Lembaga masyarakat.
- d. Peningkatan kualitas/ketahanan remaja dan penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja

- e. Penguatan kemitraan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif.
2. Sasaran II: Meningkatnya peran dan tata kelola lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat
Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Penguatan tata Kelola Lembaga kemasyarakatan dan peran Lembaga adat
 - b. Penguatan internal lembaga adat serta peningkatan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat
 3. Sasaran III: Meningkatnya pendampingan keluarga berisiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga
Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Peningkatan kompetensi Tim Pendamping Keluarga melalui pelatihan terstandar tentang pendampingan keluarga berisiko stunting
 - b. Optimalisasi pendampingan terencana dan berkelanjutan kepada keluarga sasaran berisiko stunting
 - c. Peningkatan koordinasi Tim pendamping stunting dengan tenaga Kesehatan, kader dan perangkat nagari dalam intervensi keluarga
 4. Sasaran IV: Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Peningkatan Kemandirian Desa melalui pengembangan BUMDes, pengembangan Usaha Ekonomi Produktif masyarakat desa, pengembangan Posyantek.
 - b. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan akuntabel melalui pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa serta Pengelolaan keuangan dan aset desa yang tertib dan transparan
 - c. Peningkatan sinergi antara nagari, kecamatan, perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi lokal
 5. Sasaran V: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Penguatan perencanaan kinerja berbasis hasil
 - b. Peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja
 - c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola kinerja
 6. Sasaran VI: Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat
Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Penguatan penerapan standar pelayanan publik secara konsisten dan berkelanjutan
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur dan sistem pelayanan
 7. Sasaran VII: Terwujudnya inovasi berkelanjutan
Strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan budaya kerja inovatif
 - b. Optimalisasi pemanfaatan teknologi serta monitoring dan evaluasi inovasi

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029 antara lain:

1. Sasaran I: Meningkatnya keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif
 - a. Meningkatkan kualitas keluarga dan mewujudkan masyarakat inklusif melalui penguatan fungsi keluarga, pemberdayaan masyarakat dan integrasi program lintas sektor
2. Sasaran II: Meningkatnya peran dan tata kelola lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat
 - a. Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi tokoh adat dalam bidang administrasi publik, komunikasi pemerintahan dan perencanaan pembangunan
 - b. Membangun kemitraan strategis antara lembaga adat dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan
3. Sasaran III: Meningkatnya pendampingan keluarga berisiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga
 - a. Peningkatan kualitas dan cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting melalui optimalisasi peran tim pendamping keluarga dan integrasi intervensi lintas sektor
4. Sasaran IV: Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
 - a. Peningkatan Kemandirian Desa melalui penilaian Status Indeks Desa Membangun (IDM)
5. Sasaran V: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan berorientasi pada hasil
 - b. Penguatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja guna mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel
6. Sasaran VI: Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat
 - a. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan
7. Sasaran VII: Terwujudnya inovasi berkelanjutan
 - a. Penguatan penyelenggaraan inovasi yang terencana, terintegrasi dan berkelanjutan

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
Meningkatkan kualitas keluarga dan mewujudkan masyarakat inklusif melalui penguatan fungsi keluarga, pemberdayaan masyarakat dan integrasi program lintas sektor	Meningkatkan kualitas keluarga dan mewujudkan masyarakat inklusif melalui penguatan fungsi keluarga, pemberdayaan masyarakat dan integrasi program lintas sektor	Meningkatkan kualitas keluarga dan mewujudkan masyarakat inklusif melalui penguatan fungsi keluarga, pemberdayaan masyarakat dan integrasi program lintas sektor	Meningkatkan kualitas keluarga dan mewujudkan masyarakat inklusif melalui penguatan fungsi keluarga, pemberdayaan masyarakat dan integrasi program lintas sektor	Meningkatkan kualitas keluarga dan mewujudkan masyarakat inklusif melalui penguatan fungsi keluarga, pemberdayaan masyarakat dan integrasi program lintas sektor
Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi tokoh adat dalam bidang administrasi publik, komunikasi pemerintahan dan perencanaan pembangunan	Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi tokoh adat dalam bidang administrasi publik, komunikasi pemerintahan dan perencanaan pembangunan	Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi tokoh adat dalam bidang administrasi publik, komunikasi pemerintahan dan perencanaan pembangunan	Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi tokoh adat dalam bidang administrasi publik, komunikasi pemerintahan dan perencanaan pembangunan	Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi tokoh adat dalam bidang administrasi publik, komunikasi pemerintahan dan perencanaan pembangunan
Membangun kemitraan strategis antara lembaga adat dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan	Membangun kemitraan strategis antara lembaga adat dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan	Membangun kemitraan strategis antara lembaga adat dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan	Membangun kemitraan strategis antara lembaga adat dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan	Membangun kemitraan strategis antara lembaga adat dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan
Peningkatan kualitas dan cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting melalui optimalisasi peran tim pendamping keluarga dan integrasi intervensi lintas sektor	Peningkatan kualitas dan cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting melalui optimalisasi peran tim pendamping keluarga dan integrasi intervensi lintas sektor	Peningkatan kualitas dan cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting melalui optimalisasi peran tim pendamping keluarga dan integrasi intervensi lintas sektor	Peningkatan kualitas dan cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting melalui optimalisasi peran tim pendamping keluarga dan integrasi intervensi lintas sektor	Peningkatan kualitas dan cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting melalui optimalisasi peran tim pendamping keluarga dan integrasi intervensi lintas sektor
Peningkatan Kemandirian Desa melalui penilaian Status Indeks Desa Membangun (IDM)	Peningkatan Kemandirian Desa melalui penilaian Status Indeks Desa Membangun (IDM)	Peningkatan Kemandirian Desa melalui penilaian Status Indeks Desa Membangun (IDM)	Peningkatan Kemandirian Desa melalui penilaian Status Indeks Desa Membangun (IDM)	Peningkatan Kemandirian Desa melalui penilaian Status Indeks Desa Membangun (IDM)

TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029)	TAHUN V (2030)
Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan berorientasi pada hasil	Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan berorientasi pada hasil	Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan berorientasi pada hasil	Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan berorientasi pada hasil	Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan berorientasi pada hasil
Penguatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja guna mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Penguatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja guna mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Penguatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja guna mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Penguatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja guna mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Penguatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja guna mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel
Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan
Penguatan penyelenggaraan inovasi yang terencana, terintegrasi dan berkelanjutan	Penguatan penyelenggaraan inovasi yang terencana, terintegrasi dan berkelanjutan	Penguatan penyelenggaraan inovasi yang terencana, terintegrasi dan berkelanjutan	Penguatan penyelenggaraan inovasi yang terencana, terintegrasi dan berkelanjutan	Penguatan penyelenggaraan inovasi yang terencana, terintegrasi dan berkelanjutan

Sumber: DPMDPPKB, 2025

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KET
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan kualitas pembangunan keluarga melalui standar layanan bina keluarga, penguatan paran tim pendamping keluarga	Peningkatan ketahanan keluarga	Meningkatkan kualitas keluarga dan mewujudkan masyarakat inklusif melalui penguatan fungsi keluarga, pemberdayaan masyarakat dan integrasi program lintas sektor	
2.	Peningkatan profesionalisme Lembaga kemasyarakatan desa sesuai standar pembinaan nasional	Peningkatan kapasitas kelembagaan KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang untuk mengoptimalkan fungsi iniak mamak dan bundo kanduang	Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi tokoh adat dalam bidang administrasi publik, komunikasi pemerintahan dan perencanaan pembangunan	
			Membangun kemitraan strategis antara lembaga adat dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan	
3.	Penguatan Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting	Peningkatan kualitas SDM aparatur kesehatan	Peningkatan kualitas dan cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting melalui optimalisasi peran tim pendamping keluarga dan integrasi intervensi lintas sektor	
4.	Penguatan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai pedoman utama pembangunan desa	Penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tata ruang.	Peningkatan Kemandirian Desa melalui penilaian Status Indeks Desa Membangun (IDM)	

Sumber: RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, 2025 dan DPMDPPKB, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program Perangkat Daerah adalah serangkaian kegiatan pembangunan yang direncanakan dan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta sejalan dengan RPJMD baik urusan wajib maupun pilihan, dalam kurun waktu lima tahun. Program ini menjadi bagian dari dokumen perencanaan lima tahunan yang bersifat indikatif dan berfungsi untuk mengarahkan pelaksanaan tugas serta menjadi landasan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah tahunan.

Program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah

Tujuan program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di berbagai bidang, termasuk administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas, serta penyediaan jasa penunjang. Hal ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN), memfasilitasi peningkatan pelayanan publik, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

2. Program Penataan Desa

Tujuan program penataan desa adalah mewujudkan efektivitas pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan dan daya saing desa melalui proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, atau perubahan status desa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Tujuan program peningkatan kerjasama desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat perekonomian desa melalui skala ekonomi usaha yang lebih besar dan posisi tawar yang lebih kuat, menciptakan efisiensi pelayanan publik, memelihara kelestarian lingkungan, dan mengembangkan potensi kawasan perdesaan agar desa-desa dapat maju dan berdaya saing secara bersama.

4. Program Administrasi Pemerintah Desa

Tujuan Program Administrasi Pemerintah Desa adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan efektif, meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, mendorong pembangunan desa, memastikan akuntabilitas dan transparansi, serta memberikan perlindungan hukum bagi warga desa.

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Tujuan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat adalah untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat, serta menciptakan masyarakat yang berdaya, sejahtera, dan berketahanan dengan memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan.

6. Program Pengendalian Penduduk

Tujuan program pengendalian penduduk adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk mencapai keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung lingkungan dan sumber daya, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan keluarga berkualitas, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pengentasan kemiskinan.

7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Tujuan program pembinaan keluarga berencana (KB) secara umum adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan membentuk keluarga yang berkualitas.

8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Tujuan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi, peningkatan ketahanan keluarga, dan mendorong partisipasi aktif keluarga dalam pembangunan untuk mewujudkan keluarga yang mandiri, tangguh, dan modern.

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

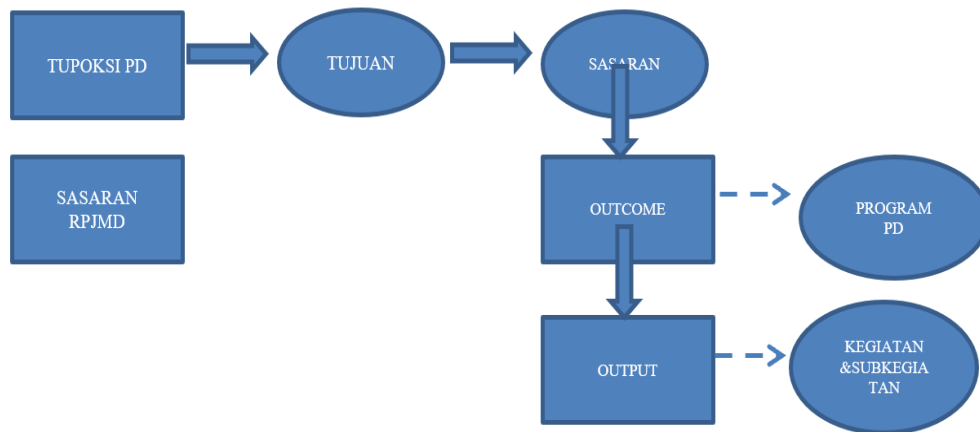
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Penataan Desa
Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Penataan Desa
- 3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
- 4. Program Administrasi Pemerintah Desa
Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- 5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 6. Program Pengendalian Penduduk
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
- 7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- 8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Gambar 4.1
 Kerangka Perumusan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



4.3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Teknik merumuskan program/kegiatan/subkegiatan dan rincian rencana program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.13.2.14.0.00.12.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
- Meningkatnya keluarga berkualitas, dan masyarakat inklusif - Nagari Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya keluarga berkualitas, dan masyarakat inklusif serta terwujudnya nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi				Indeks Pembangunan Keluarga (Angka)		
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang terfasilitasi (%)		
					Persentase keluarga beresiko stunting yang terdampingi oleh Tim Pendamping Keluarga(%)		
					Persentase Desa Mandiri (%)		
					Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Angka)		
					Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)		
					Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan (Inovasi)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif			Indeks Pembangunan Keluarga (Angka)		
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Tersusunnya dokumen kebijakan yang terpadu dan selaras antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	
					Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.14.02.2.01.0031 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
				Tersedianya data dan informasi keluarga, serta pengolahan dan pelaporan data pengendalian penduduk	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui	2.14.02.2.02.0023 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	Keluarga	
					Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Terlaksananya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program bangga kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK	
					Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	2.14.03.2.01.0009 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)		
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	
				Terfasilitasinya tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)		
					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
					Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	Berencana (PKB/PLKB)	
				Terlaksananya pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)		2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)		2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
				Terlaksananya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				kesertaan ber KB		Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
		Meningkatnya peran dan tata kelola lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat			Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang terfasilitasi (%)		
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi desa dalam pembangunan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat	2.13.05.2.01.0001 - Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Hukum Adat (Dokumen)	Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	2.13.05.2.01.0004 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Laporan)		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
		Meningkatnya pendampingan keluarga beresiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga			Persentase Keluarga beresiko Stunting yang terdampingi oleh Tim Pendamping Keluarga (%)		
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)			Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Terlaksananya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)		
					Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan	2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)		
					Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Keluarga	
					Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat	2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					pendampingan (laporan)		
					Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	
		Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			Persentase Desa Mandiri (%)		
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Desa yang Tertib Administrasi dan Keuangan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Peningkatan Kapasitas (Orang)	Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pemerintahan Desa (Dokumen)	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0006 - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan,	2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	Pemberhentian Kepala Desa	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0010 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
					Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	2.13.04.2.01.0015 - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	2.13.04.2.01.0016 - Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Angka)		
			Cakupan administrasi kantor yang ditata		Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(%)		
				tersusunnya dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, serta laporan capaian kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.13.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah yang baik	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		
				Terfasilitasinya administrasi kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.13.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.13.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					yang Disediakan (Unit)		
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.13.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa pelayanan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.13.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber: DPMDPPKB, 2025

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5.897.856.659,00		7.013.630.156,00		8.837.069.338,00		9.412.408.045,00		17.969.984.888,00		
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.401.297.593,00		4.257.800.000,00		4.365.800.000,00		4.465.890.000,00		5.563.489.000,00		
Cakupan administrasi kantor yang ditata	Persentase terlaksananya layanan administrasi perangkat daerah (%)	100	100	3.401.297.593,00	100	4.257.800.000,00	100	4.365.800.000,00	100	4.465.890.000,00	100	5.563.489.000,00	2.13.2.14.0.00 .12.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.167.500,00		23.525.000,00		27.925.000,00		31.500.000,00		33.500.000,00		
tersusunnya dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, serta laporan capaian kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	3	9.167.500,00	2	23.525.000,00	2	27.925.000,00	2	31.500.000,00	2	33.500.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	19	19		19		19		19		19			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.240.000,00		8.200.000,00		10.000.000,00		11.500.000,00		12.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	3	3.240.000,00	2	8.200.000,00	2	10.000.000,00	2	11.500.000,00	2	12.000.000,00		
2.13.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.927.500,00		11.345.000,00		13.345.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5	5	4.927.500,00	5	11.345.000,00	5	13.345.000,00	5	14.000.000,00	5	15.000.000,00		
2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.000.000,00		3.980.000,00		4.580.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	19	19	1.000.000,00	19	3.980.000,00	19	4.580.000,00	19	6.000.000,00	19	6.500.000,00		
2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.970.159.993,00		3.600.057.748,00		3.645.696.973,00		3.695.690.000,00		3.748.189.000,00		
Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah yang baik	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	2.970.159.993,00	2	3.600.057.748,00	2	3.645.696.973,00	2	3.695.690.000,00	2	3.748.189.000,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	25		25		25		25		25			
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.966.549.993,00		3.591.027.748,00		3.635.666.973,00		3.684.690.000,00		3.736.189.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	25	2.966.549.993,00	25	3.591.027.748,00	25	3.635.666.973,00	25	3.684.690.000,00	25	3.736.189.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.610.000,00		9.030.000,00		10.030.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	3.610.000,00	2	9.030.000,00	2	10.030.000,00	2	11.000.000,00	2	12.000.000,00		
2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		8.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		11.500.000,00		
Terfasilitasinya administrasi kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	4	0,00	4	8.000.000,00	4	10.000.000,00	4	11.000.000,00	4	11.500.000,00		
2.13.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		8.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		11.500.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	4	0,00	4	8.000.000,00	4	10.000.000,00	4	11.000.000,00	4	11.500.000,00		
2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				71.092.073,00		129.639.225,00		143.500.000,00		162.500.000,00		179.500.000,00		
Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	71.092.073,00	1	129.639.225,00	1	143.500.000,00	1	162.500.000,00	1	179.500.000,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6		6		7		7		7			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8	8		8		8		8		8		8		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	5		5		5		5		5		5		
2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				500.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6	500.000,00	6	3.500.000,00	7	4.000.000,00	7	4.500.000,00	7	5.000.000,00			
2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		18.500.000,00		19.000.000,00			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10	8.000.000,00	10	15.000.000,00	10	17.000.000,00	10	18.500.000,00	10	19.000.000,00			
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		11.500.000,00			
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	5	2.000.000,00	5	8.000.000,00	5	10.000.000,00	5	11.000.000,00	5	11.500.000,00			
2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		5.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00			
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8	8	0,00	8	5.000.000,00	8	6.000.000,00	8	6.000.000,00	8	6.000.000,00			
2.13.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000,00		10.200.000,00		11.500.000,00		12.500.000,00		13.000.000,00			
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	3.000.000,00	1	10.200.000,00	1	11.500.000,00	1	12.500.000,00	1	13.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				57.592.073,00		87.939.225,00		95.000.000,00		110.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	57.592.073,00	1	87.939.225,00	1	95.000.000,00	1	110.000.000,00	1	125.000.000,00		
2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		54.000.000,00		69.000.000,00		75.000.000,00		1.080.500.000,00		
Tersedianya pengadaan abarang milik daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	54.000.000,00	1	69.000.000,00	1	75.000.000,00	1	1.080.500.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		2		2		2		3			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		3		5		6		7			
2.13.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		500.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00		
2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		12.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00		16.500.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	2	12.000.000,00	2	15.000.000,00	2	16.000.000,00	3	16.500.000,00		
2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan				0,00		40.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Mesin Lainnya															
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	3	40.000.000,00	5	50.000.000,00	6	55.000.000,00	7	60.000.000,00			
2.13.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		500.000.000,00			
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00			
2.13.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		2.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00			
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	2.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00			
2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				133.243.300,00		151.943.300,00		164.043.300,00		171.200.000,00		176.800.000,00			
Tersedianya jasa pelayanan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	133.243.300,00	1	151.943.300,00	1	164.043.300,00	1	171.200.000,00	1	176.800.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300.000,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00			
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	300.000,00	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00			
2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa				55.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	55.000.000,00	1	65.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00			
2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				77.943.300,00		85.943.300,00		87.943.300,00		90.000.000,00		90.500.000,00			
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	77.943.300,00	1	85.943.300,00	1	87.943.300,00	1	90.000.000,00	1	90.500.000,00			
2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				217.634.727,00		290.634.727,00		305.634.727,00		319.000.000,00		333.500.000,00			
Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3	217.634.727,00	3	290.634.727,00	3	305.634.727,00	3	319.000.000,00	3	333.500.000,00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	66	7		7		7		7		7				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	3		3		3		3		3				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	65	50		50		50		50		50				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1												
2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan				210.634.727,00		260.634.727,00		270.634.727,00		280.000.000,00		290.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	66	7	210.634.727,00	7	260.634.727,00	7	270.634.727,00	7	280.000.000,00	7	290.000.000,00			
2.13.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		7.500.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	3	0,00	3	5.000.000,00	3	6.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.500.000,00			
2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000,00		12.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	65	50	5.000.000,00	50	12.000.000,00	50	14.000.000,00	50	15.000.000,00	50	16.000.000,00			
2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.500.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3	1.500.000,00	3	13.000.000,00	3	15.000.000,00	3	17.000.000,00	3	20.000.000,00			
2.13.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				40.000,00		46.000.000,00		52.900.000,00		60.835.000,00		69.960.250,00			
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	85	85	40.000,00	85	46.000.000,00	85	52.900.000,00	85	60.835.000,00	85	69.960.250,00	2.13.2.14.0.00.12.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa				40.000,00		46.000.000,00		52.900.000,00		60.835.000,00		69.960.250,00	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Persentase terlaksananya penataan desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	0	0	40.000,00	2	46.000.000,00	2	52.900.000,00	2	60.835.000,00	2	69.960.250,00			
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	0	75		75		75		75						
	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	0	0		1		0		0						
2.13.02.2.01.0001 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				0,00		10.000.000,00		0,00		0,00		0,00			
Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.13.02.2.01.0002 - Fasilitasi Tata Wilayah Desa				0,00		13.000.000,00		26.450.000,00		30.417.500,00		34.980.125,00			
Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	0	0	0,00	2	13.000.000,00	2	26.450.000,00	2	30.417.500,00	2	34.980.125,00			
2.13.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa				40.000,00		23.000.000,00		26.450.000,00		30.417.500,00		34.980.125,00			
Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	0	75	40.000,00	75	23.000.000,00	75	26.450.000,00	75	30.417.500,00	75	34.980.125,00			
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				1.520.000,00		11.500.000,00		13.225.000,00		15.208.750,00		17.490.062,00			
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	85	85	1.520.000,00	85	11.500.000,00	85	13.225.000,00	85	15.208.750,00	85	17.490.062,00	2.13.2.14.0.00 .12.0000 - Dinas		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa				1.520.000,00		11.500.000,00		13.225.000,00		15.208.750,00		17.490.062,00	Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Persentase terlaksananya kerja sama desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1.520.000,00	1	11.500.000,00	1	13.225.000,00	1	15.208.750,00	1	17.490.062,00			
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		1		1		1		1				
2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				20.000,00		5.750.000,00		6.612.500,00		7.604.375,00		8.745.031,00			
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	20.000,00	1	5.750.000,00	1	6.612.500,00	1	7.604.375,00	1	8.745.031,00			
2.13.03.2.01.0002 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				1.500.000,00		5.750.000,00		6.612.500,00		7.604.375,00		8.745.031,00			
Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1.500.000,00	1	5.750.000,00	1	6.612.500,00	1	7.604.375,00	1	8.745.031,00			
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				1.571.622.741,00		1.728.785.015,00		2.525.144.338,00		2.805.474.295,00		8.118.045.576,00			
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	90	90	1.571.622.741,00	90	1.728.785.015,00	90	2.525.144.338,00	90	2.805.474.295,00	90	8.118.045.576,00	2.13.2.14.0.00.12.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	90	90		90		90		90						
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1.571.622.741,00		1.728.785.015,00		2.525.144.338,00		2.805.474.295,00		8.118.045.576,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase Desa yang Tertib Administrasi dan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	1	1	1.571.622.741,00	1	1.728.785.015,00	1	2.525.144.338,00	1	2.805.474.295,00	1	8.118.045.576,00		
	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	150	150		150		150		150		150			
	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	0	0		0		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	0	0		0		0		0		1			
2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				83.536.891,00		95.000.000,00		150.618.715,00		173.211.522,00		199.193.251,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	83.536.891,00	1	95.000.000,00	1	150.618.715,00	1	173.211.522,00	1	199.193.251,00		
2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				8.000.000,00		10.000.000,00		111.784.313,00		128.551.959,00		147.834.753,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	1	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00	1	111.784.313,00	1	128.551.959,00	1	147.834.753,00		
2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				3.000.000,00		5.000.000,00		39.675.000,00		45.626.250,00		52.470.188,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	0	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	39.675.000,00	1	45.626.250,00	1	52.470.188,00		
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1.433.085.850,00		1.563.785.015,00		1.976.033.879,00		2.173.637.266,00		2.391.000.993,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	1	1	1.433.085.850,00	1	1.563.785.015,00	1	1.976.033.879,00	1	2.173.637.266,00	1	2.391.000.993,00		
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				25.000.000,00		30.000.000,00		85.363.520,00		98.168.048,00		112.893.255,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	150	150	25.000.000,00	150	30.000.000,00	150	85.363.520,00	150	98.168.048,00	150	112.893.255,00		
2.13.04.2.01.0006 - Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa				15.000.000,00		20.000.000,00		42.585.413,00		48.973.224,00		56.319.208,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	42.585.413,00	1	48.973.224,00	1	56.319.208,00		
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				0,00		0,00		0,00		0,00		5.000.000.000,00		
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.000.000.000,00		
2.13.04.2.01.0010 - Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				0,00		0,00		20.425.000,00		23.848.750,00		27.858.063,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	1	20.425.000,00	1	23.848.750,00	1	27.858.063,00		
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa				4.000.000,00		5.000.000,00		6.083.500,00		6.996.025,00		8.045.429,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	1	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00	1	6.083.500,00	1	6.996.025,00	1	8.045.429,00		
2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				0,00		0,00		33.062.500,00		38.021.875,00		43.725.156,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	33.062.500,00	1	38.021.875,00	1	43.725.156,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.04.2.01.0015 - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa				0,00		0,00		33.062.500,00		38.021.875,00		43.725.156,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	0	0	0,00	0	0,00	2	33.062.500,00	2	38.021.875,00	2	43.725.156,00		
2.13.04.2.01.0016 - Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				0,00		0,00		26.449.998,00		30.417.501,00		34.980.124,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	1	26.449.998,00	1	30.417.501,00	1	34.980.124,00		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				923.376.325,00		969.545.141,00		1.880.000.000,00		2.065.000.000,00		4.201.000.000,00		
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	80	80	923.376.325,00	80	969.545.141,00	80	1.880.000.000,00	80	2.065.000.000,00	80	4.201.000.000,00	2.13.2.14.0.00 .12.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	85	85		85		85		85		85			
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				923.376.325,00		969.545.141,00		1.880.000.000,00		2.065.000.000,00		4.201.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi desa dalam pembangunan desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	923.376.325,00	1	969.545.141,00	1	1.880.000.000,00	1	2.065.000.000,00	1	4.201.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	7	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
2.13.05.2.01.0001 - Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				5.000.000,00		6.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00			
Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00			
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				645.376.325,00		669.545.141,00		985.000.000,00		1.000.000.000,00		2.276.000.000,00			
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	1	1	645.376.325,00	1	669.545.141,00	1	985.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	2.276.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Adat (Dokumen)														
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				150.000.000,00		165.000.000,00		275.000.000,00		325.000.000,00		650.000.000,00			
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	7	5	150.000.000,00	5	165.000.000,00	5	275.000.000,00	5	325.000.000,00	5	650.000.000,00			
2.13.05.2.01.0004 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				0,00		0,00		40.000.000,00		45.000.000,00		75.000.000,00			
Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	0	2	0,00	2	0,00	2	40.000.000,00	2	45.000.000,00	2	75.000.000,00			
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan				28.000.000,00		30.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa															
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2	2	28.000.000,00	2	30.000.000,00	2	150.000.000,00	2	200.000.000,00	2	300.000.000,00			
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				5.000.000,00		6.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		300.000.000,00			
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	300.000.000,00			
2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				40.000.000,00		43.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		400.000.000,00			
Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	1	40.000.000,00	1	43.000.000,00	1	200.000.000,00	1	225.000.000,00	1	400.000.000,00			
2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				50.000.000,00		50.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00			
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00	1	100.000.000,00			
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.326.238.067,00		7.947.184.471,00		10.632.000.000,00		13.405.000.000,00		18.526.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				5.110.000,00		260.000.000,00		286.000.000,00		420.000.000,00		500.000.000,00		
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,29	2,28	5.110.000,00	2,25	260.000.000,00	2,22	286.000.000,00	2,20	420.000.000,00	2,18	500.000.000,00	2.13.2.14.0.00 .12.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				5.110.000,00		170.000.000,00		166.000.000,00		270.000.000,00		320.000.000,00		
Tersusunnya dokumen kebijakan yang terpadu dan selaras antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	5.110.000,00	1	170.000.000,00	1	166.000.000,00	1	270.000.000,00	1	320.000.000,00		
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	0	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2	0		7		8		9		10			
	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana				0,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	0	0	0,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00		
2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				5.110.000,00		50.000.000,00		6.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	5.110.000,00	1	50.000.000,00	1	6.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00		
2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				0,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	2	0	0,00	7	30.000.000,00	8	40.000.000,00	9	50.000.000,00	10	60.000.000,00		
2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				0,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	0	0	0,00	2	30.000.000,00	2	40.000.000,00	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00		
2.14.02.2.01.0031 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				0,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal	0	0	0,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota (Dokumen)														
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		90.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00			
Tersedianya data dan informasi keluarga, serta pengolahan dan pelaporan data pengendalian penduduk	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	0	0	0,00	1	90.000.000,00	1	120.000.000,00	1	150.000.000,00	1	180.000.000,00			
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	0	0		3		4		5		4				
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				0,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00			
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	0	1	0,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.2.02.0023 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga				0,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	0	0	0,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00		
2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain				0,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	0	0	0,00	3	30.000.000,00	4	40.000.000,00	5	50.000.000,00	4	60.000.000,00		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				5.202.428.692,00		5.462.550.127,00		7.080.000.000,00		9.505.000.000,00		13.297.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	67,41	69,93	5.202.428.692,00	70,43	5.462.550.127,00	70,93	7.080.000.000,00	71,43	9.505.000.000,00	71,93	13.297.000.000,00	2.13.2.14.0.00.12.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
														Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	8,44	7,44		6,94		6,44		5,94		5,44				
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.630.000.000,00		1.765.000.000,00		1.905.000.000,00		3.255.000.000,00		4.600.000.000,00			
Terlaksananya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program bangga kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	14	14	1.630.000.000,00	14	1.765.000.000,00	14	1.905.000.000,00	14	3.255.000.000,00	14	4.600.000.000,00			
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	1	2		2		2		2		2				
2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK				50.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00			
Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	65.000.000,00	1	75.000.000,00	1	85.000.000,00	1	100.000.000,00			
2.14.03.2.01.0009 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana				580.000.000,00		600.000.000,00		630.000.000,00		670.000.000,00		700.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	1	2	580.000.000,00	2	600.000.000,00	2	630.000.000,00	2	670.000.000,00	2	700.000.000,00		
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.200.000.000,00		2.500.000.000,00		3.800.000.000,00		
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	14	14	1.000.000.000,00	14	1.100.000.000,00	14	1.200.000.000,00	14	2.500.000.000,00	14	3.800.000.000,00		
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				1.753.000.000,00		1.950.000.000,00		1.950.000.000,00		2.650.000.000,00		3.507.000.000,00		
Terfasilitasinya tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	1.000	1.000	1.753.000.000,00	1.000	1.950.000.000,00	1.000	1.950.000.000,00	1.000	2.650.000.000,00	1.000	3.507.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)														
	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	0	2		2		2		2		2		2		
2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB				503.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		7.000.000,00			
Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	0	2	503.000.000,00	2	700.000.000,00	2	700.000.000,00	2	700.000.000,00	2	7.000.000,00			
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		1.500.000.000,00		3.000.000.000,00			
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	1.000	1.000	900.000.000,00	1.000	900.000.000,00	1.000	900.000.000,00	1.000	1.500.000.000,00	1.000	3.000.000.000,00			
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00			
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	0	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	450.000.000,00	1	500.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)														
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				1.349.428.692,00		1.267.550.127,00		2.710.000.000,00		3.075.000.000,00		4.590.000.000,00			
Terlaksananya pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	1	1	1.349.428.692,00	1	1.267.550.127,00	4	2.710.000.000,00	4	3.075.000.000,00	5	4.590.000.000,00			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	1.754	1.534		1.459		1.384		1.309		1.234				
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				400.000.000,00		45.000.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		90.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	1	400.000.000,00	1	45.000.000,00	1	60.000.000,00	1	75.000.000,00	1	90.000.000,00		
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				750.000.000,00		800.000.000,00		850.000.000,00		1.000.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	1.754	1.534	750.000.000,00	1.459	800.000.000,00	1.384	850.000.000,00	1.309	1.000.000.000,00	1.234	1.500.000.000,00		
2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				199.428.692,00		422.550.127,00		1.800.000.000,00		2.000.000.000,00		3.000.000.000,00		
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	1	1	199.428.692,00	1	422.550.127,00	4	1.800.000.000,00	4	2.000.000.000,00	5	3.000.000.000,00		
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				470.000.000,00		480.000.000,00		515.000.000,00		525.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	30	49	470.000.000,00	55	480.000.000,00	61	515.000.000,00	68	525.000.000,00	75	600.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	0	10		10		10		10		10		10		
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00			
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	0	10	225.000.000,00	10	225.000.000,00	10	225.000.000,00	10	225.000.000,00	10	225.000.000,00	10	225.000.000,00	
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				225.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00			
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	30	49	225.000.000,00	55	225.000.000,00	61	250.000.000,00	68	250.000.000,00	75	275.000.000,00			
2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00			
Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	0	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00			
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				2.118.699.375,00		2.224.634.344,00		3.266.000.000,00		3.480.000.000,00		4.729.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Presentase)	100	100	2.118.699.375,00	100	2.224.634.344,00	100	3.266.000.000,00	100	3.480.000.000,00	100	4.729.000.000,00	2.13.2.14.0.00 .12.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				201.600.000,00		260.600.000,00		321.000.000,00		380.000.000,00		474.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1	1	201.600.000,00	1	260.600.000,00	1	321.000.000,00	1	380.000.000,00	1	474.000.000,00		
	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	0	80		80		80		80		80			
	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	0	80		80		80		80		80			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)														
	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	6	5		5		5		5		5				
	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	0	5		5		5		5		5				
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	0	2		2		2		2		2				
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,				75.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)															
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00			
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				28.000.000,00		42.000.000,00		56.000.000,00		70.000.000,00		84.000.000,00			
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	0	2	28.000.000,00	2	42.000.000,00	2	56.000.000,00	2	70.000.000,00	2	84.000.000,00			
2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	0	80	20.000.000,00	80	30.000.000,00	80	40.000.000,00	80	50.000.000,00	80	55.000.000,00		
2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				33.600.000,00		33.600.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	0	80	33.600.000,00	80	33.600.000,00	80	35.000.000,00	80	35.000.000,00	80	50.000.000,00		
2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor				10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
(UPPKA)															
Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	6	5	10.000.000,00	5	15.000.000,00	5	20.000.000,00	5	25.000.000,00	5	30.000.000,00			
2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00			
Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	0	5	35.000.000,00	5	40.000.000,00	5	45.000.000,00	5	50.000.000,00	5	55.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1.917.099.375,00		1.964.034.344,00		2.945.000.000,00		3.100.000.000,00		4.255.000.000,00		
Terlaksananya peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	0	1	1.917.099.375,00	1	1.964.034.344,00	1	2.945.000.000,00	1	3.100.000.000,00	1	4.255.000.000,00		
	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon				1.000.000.000,00		1.050.000.000,00		1.100.000.000,00		1.150.000.000,00		1.700.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)															
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	0	1	1.000.000.000,00	1	1.050.000.000,00	1	1.100.000.000,00	1	1.150.000.000,00	1	1.700.000.000,00			
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				382.099.375,00		274.034.344,00		1.100.000.000,00		1.150.000.000,00		1.700.000.000,00			
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	0	1	382.099.375,00	1	274.034.344,00	1	1.100.000.000,00	1	1.150.000.000,00	1	1.700.000.000,00			
2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00			
Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	0	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga				500.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	0	1	500.000.000,00	1	600.000.000,00	1	700.000.000,00	1	750.000.000,00	1	800.000.000,00		

Sumber: DPMDPPKB, 2025

4.4. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan kegiatan/subkegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka tabel 4.3 akan menjelaskan kegiatan/subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Priritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat hukum adat	
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			Subkegiatan Pengendalian Program KKBPK	
			Subkegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	
			Subkegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
			Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			Subkegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	

NO	PROGRAM PRIORITY	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Subkegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
			Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
			Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			Subkegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			Subkegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
			Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			Subkegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
			Subkegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	
			Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Subkegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Subkegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			Subkegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			Subkegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			Subkegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			Subkegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Subkegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
			Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Subkegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
			Subkegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
			Subkegiatan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	
			Subkegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	
4	Program Penataan Desa	Meningkatnya kualitas penataan desa	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	
			Subkegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Subkegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	
5	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
6	Program Administrasi Pemerintah Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
			Subkegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
			Subkegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
			Subkegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	

Sumber: DPMDPPKB, 2025

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

IKU adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi atau unit kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Tujuan penetapan IKU bagi perangkat daerah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam manajemen kinerja yang baik, serta menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU juga berfungsi sebagai dasar untuk perbaikan kinerja, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan alat untuk perencanaan, pemantauan, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah.

IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,92	63,42	63,97	64,49	64,99	65,49	
2	Persentase Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat yang terfasilitasi	%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase keluarga beresiko stunting yang terdampingi oleh Tim Pendamping Keluarga	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Desa Mandiri	%	66,67%	68%	69,33%	70,67%	72%	73,33%	
5	Predikat Akuntabilitas	%	BB (71.50)	BB (71.70)	BB (71.90)	BB (72.10)	BB (72.30)	BB (72.50)	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kinerja								
6	Survey Kepuasan Masyarakat	%	89,50	89,70	89,90	90,10	90,30	90,50	
7	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	Jumlah	1	1	1	1	1	1	

Sumber: DPMDPPKB, 2025

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

IKK adalah ukuran atau metrik yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. IKK menyediakan data yang dapat diukur (kuantitatif atau kualitatif) dan memberikan gambaran terukur tentang tingkat pencapaian prioritas strategis sebuah organisasi.

Tujuan penetapan IKK bagi perangkat daerah adalah untuk mendapatkan informasi kinerja yang terukur, mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan strategis, memperbaiki manajemen kinerja, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja kepada pemangku kepentingan. IKK ini menjadi acuan penting dalam perencanaan, penganggaran, pengukuran, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah.

IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0	0	0	0	0	0	
2	Persentase Desa Mandiri	%	66,67	68	69,33	70,67	72	73,33	
B	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,31	2,28	2,25	2,22	2,20	2,18	
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	%	69,43	69,93	70,43	70,93	71,43	71,93	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,94	7,44	6,94	6,44	5,94	5,44	

Sumber: DPMDPPKB, 2025

BAB V PENUTUP

Dengan tersusunnya Renstra 2025-2026 maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar telah mempunyai acuan dalam arah pembangunan lima tahun kedepan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Jadi visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur dengan memperhatikan faktor-faktor :

- a) Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
- b) Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi.
- c) Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.

Dalam menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontiniu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Manajemen risiko merupakan suatu proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan untuk meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi dampak merugikan pada suatu kejadian. Pelaksanaan manajemen risiko diperlukan untuk membantu pencapaian target RPJMD. Manajemen risiko sebagai upaya untuk meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi dampak merugikan.

Kerangka manajemen risiko dalam pengendalian pembangunan daerah meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian tingkat risiko, perencanaan langkah mitigasi, pelaksanaan mitigasi, serta pemantauan dan evaluasi efektivitasnya. Tahapan ini perlu terintegrasi dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah sehingga setiap potensi hambatan dapat diantisipasi sejak dini. Selain itu, diperlukan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara Perangkat Daerah, pimpinan daerah, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan tindak lanjut hasil evaluasi risiko benar-benar dijalankan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas kegiatan prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan anggaran. Pengendalian

ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini memerlukan mekanisme pelaporan berkala yang transparan dan berbasis data, sehingga setiap penyimpangan dari target atau jadwal dapat segera dikoreksi. Sistem pengendalian harus memanfaatkan teknologi informasi seperti dashboard monitoring, e-planning, dan e-budgeting untuk mempermudah pemantauan real-time.

Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mencakup pemantauan pelaksanaan proyek prioritas, pemantauan mitigasi risiko pembangunan, monitoring dan evaluasi sasaran prioritas pembangunan nasional, dan evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama serta program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR



Drs. HERISON
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680619 198902 1 002